



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 350613
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX

: (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179

Email

: ditjenhubdat@dephub.go.id

Homepage

: <http://hubdat.dephub.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
NOMOR : KP-DPTJ 37 Tahun 2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2025-2029**

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor KP-DRJD 2738 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025-2029**
- PERTAMA :** Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/ outcome yang digunakan oleh masing – masing Subdirektorat/ bagian di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk menetapkan:
- a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja;
- KETIGA :** Penyusunan Indikator Kinerja tingkat Eselon II berupa Indikator Kinerja Kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- KEEMPAT :** Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur bahwa Perjanjian Kinerja ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran untuk tingkat Eselon II.
- KELIMA :** Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disampaikan kepada Direktur Prasarana Transportasi Jalan.

KEENAM : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Koordinator Kelompok Tata Usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, dan Anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja; dan
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

KETUJUH : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Desember 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Toni Tauladan, S.Si, M.T
NIP. 19700910 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

Lampiran I

Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Nomor : KP-DPTJ 37 Tahun 2025

Tanggal : 29 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	SK 1.1.4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan terminal tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas	IKK 1.1.4	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	0.85 2	0.85 2	0.873	0.88 7
2	SK 1.1.5	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 1.1.5	Rasio terminal barang untuk umum yang dibangun dan siap beroperasi melayani angkutan barang	Rasio	0.600	0.60 0	0.70 0	0.800	1.00 0
3	SKK 2.5	Meningkatnya Kapasitas operasi layanan terminal Barang sesuai SPM	IKK 2.5	Persentase layanan operasi terminal Barang sesuai SPM	%	32.89	43.0 4	49.0 0	54.71	62.4 3
4	SKK 2.6	Meningkatnya Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM	IKK 2.6.1	Persentase layanan operasi terminal tipe A sesuai SPM	%	2.65	3.54	4.42	5.17	5.93
			IKK 2.6.2	Presentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman	%	21	21	25	33	41

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
5	SKK 2.7	Meningkatnya Keterpaduan dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Sistem Transportasi	IKK 2.7	Presentase Penyelesaian Dokumen RIJLLAJ yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Transportasi Jalan	%	0.01	0.06	0.08	0.14	0.17
6	SKK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.4	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Barang melalui Pengawasan di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM	%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
7	SP 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	82.3	82.76	82.78	82.8	82.82
			IKK 4.3	Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3.38	3.38	3.39	3.4	3.4
			IKK 4.4	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	94.1	96,12	96,17	96,22	96,27
			IKK 4.6	Tingkat Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan	%	100	100	100	100	100
			IKK 4.7	Indeks Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Indeks	3.2	3.54	3.55	3.56	3.57

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
			IKK 4.10	Tingkat Digitalisasi Arsip (Skor)	Nilai	79.11	79.16	79.21	79.26	79.31
			IKK 4.17	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80.1	80.2	80.3	80.4

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Toni Tauladan, S.Si, M.T NIP.
19700910 199703 1 002



**DIREKTORAT
PRASARANA
TRANSPORTASI
JALAN**

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 MANUAL IKK



KONEKTIVITAS

Subdit Terminal Penumpang
Subdit Terminal Barang

PELAYANAN

Subdit Terminal Penumpang
Subdit Terminal Barang
Subdit Jaringan dan
Kepengusahaan Transportasi
Jalan

KESELAMATAN

Subdit Penimbangan
Kendaraan Bermotor

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Seluruh Subdit
Kelompok Tata Usaha



PROGRAM KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT



PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK1.1.4)	Meningkatnya rasio konektivitas layanan terminal tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK1.1.4)	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas

DEFINISI:

IKK Rasio beroperasinya layanan Terminal Tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas adalah perbandingan jumlah Terminal Tipe A beroperasi terhadap rencana jumlah Terminal Tipe A terbangun.

Jumlah Terminal Tipe A beroperasi merupakan jumlah seluruh Terminal Tipe A yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal Tipe A yang dimaksud mencakup seluruh Terminal Tipe A di Indonesia baik yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat maupun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.

Jumlah rencana Terminal Tipe A terbangun merupakan jumlah seluruh Terminal Tipe A eksisting ditambah dengan jumlah Terminal Tipe A baru yang direncanakan untuk dibangun. Jumlah Terminal Tipe A yang direncanakan untuk dibangun diperoleh dari inventarisasi kebutuhan pembangunan Terminal Tipe A baru yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Daftar seluruh Terminal Tipe A eksisting dan Terminal Tipe A yang direncanakan untuk dibangun adalah sebagai berikut :

Terminal Tipe A Eksisting

1. Terminal Langsa
2. Terminal Lhokseumawe
3. Terminal Meulaboh
4. Terminal Batoh
5. Terminal Paya Ilang
6. Terminal Tanjung Pinggir
7. Terminal Madya Tarutung
8. Terminal Sibolga
9. Terminal Padang Bulan
10. Terminal Amplas
11. Terminal Pinang Baris
12. Terminal Anak Air
13. Terminal Kiliran Jao
14. Terminal Bareh Solok
15. Terminal Simpang Aur
16. Terminal Jati Pariaman
17. Terminal Bangkinang
18. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki
19. Terminal Dumai

20. Terminal Gerbangsari
21. Terminal Alam Barajo
22. Terminal Muara Bungo
23. Terminal Bangko
24. Terminal Sribulan
25. Terminal Alang-Alang Lebar
26. Terminal Kayuagung
27. Terminal Batu Kuning
28. Terminal Betung
29. Terminal Karya Jaya
30. Terminal Simpang Priuk
31. Terminal Regional Lahat
32. Terminal Simpang Nangka
33. Terminal Air Sebakul
34. Terminal Rajabasa
35. Terminal Betan Subing
36. Terminal Pakupatan
37. Terminal Labuan
38. Terminal Mandala Lebak
39. Terminal Merak
40. Terminal Poris Plawad
41. Terminal Pondok Cabe
42. Terminal KH. Ahmad Sanusi
43. Terminal Ciakar
44. Terminal Guntur Melati
45. Terminal Harjamukti
46. Terminal Indihiang
47. Terminal Kuningan
48. Terminal Subang
49. Terminal Banjar
50. Terminal Cikampek
51. Terminal Baranangsiang
52. Terminal Induk Bekasi
53. Terminal Jatiasih
54. Terminal Kalijaya Cikarang
55. Terminal Jatijajar
56. Terminal Cicaheum
57. Terminal Leuwipanjang
58. Terminal Purworejo
59. Terminal Cepu
60. Terminal Bangga Bangun Desa
61. Terminal Giri Adipura
62. Terminal Ir. Soekarno
63. Terminal Kebumen
64. Terminal Mangkang
65. Terminal Pekalongan
66. Terminal Induk Pematang
67. Terminal Purwokerto
68. Terminal Mendolo
69. Terminal Bawen
70. Terminal Tidar
71. Terminal Tingkir

72. Terminal Tirtonadi
73. Terminal Jati Kudus
74. Terminal Bobot Sari
75. Terminal Demak
76. Terminal Tegal
77. Terminal Giwangan
78. Terminal Dhaksinarga
79. Terminal Arjosari
80. Terminal Arya Wiraraja
81. Terminal Bangkalan
82. Terminal Banyuwangga
83. Terminal Gayatri
84. Terminal Kertonegoro
85. Terminal Pacitan
86. Terminal Patria
87. Terminal Purboyo
88. Terminal Seloaji
89. Terminal Tamanan
90. Terminal Tawangalun
91. Terminal Surodakan
92. Terminal Rajekwesi
93. Terminal Pasuruan
94. Terminal Kambang Putih
95. Terminal Sri Tanjung
96. Terminal Osowilangun
97. Terminal Purabaya
98. Terminal Mengwi
99. Terminal Mandalika
100. Terminal Sumer Payung
101. Terminal Dara
102. Terminal Kefamenanu
103. Terminal Bimoku
104. Terminal Sei Ambawang
105. Terminal Singkawang
106. Terminal W.A. Gara
107. Terminal Gambut Barakat
108. Terminal Batu Ampar
109. Terminal Samarinda Seberang
110. Terminal Induk Lumpue
111. Terminal Latenri Sessu Pekkae
112. Terminal Petta Pongawai
113. Terminal Daya
114. Terminal Simbuang
115. Terminal Tipalayo
116. Terminal Kasintuwu
117. Terminal Mamboro
118. Terminal Boroko
119. Terminal Liwas
120. Terminal Tangkoko
121. Terminal Bolaang Mongondow
122. Terminal Malalayang
123. Terminal Puuwatu

124. Terminal Isimu
125. Terminal Duingi
126. Terminal Entrop
127. Terminal Kampung Rambutan
128. Terminal Kalideres
129. Terminal Pulo Gebang

Terminal Tipe A Baru yang Direncanakan untuk Dibangun

1. Terminal Palopo
2. Terminal Mandai
3. Terminal Tanjung Selor
4. Terminal Nanga Badau
5. Terminal Entikong
6. Terminal Sambas
7. Terminal Parigi Moutong
8. Terminal Dairi
9. Terminal Jepara
10. Terminal Pangandaran
11. Terminal Manokwari
12. Terminal Sorong
13. Terminal Toraja Utara

Jumlah Rencana Terminal Tipe A Terbangun

Jumlah Terminal Tipe A Eksisting + Jumlah Terminal Tipe A Baru yang Direncanakan untuk Dibangun = 129 + 13 = 142

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A beroperasi}}{\text{Jumlah rencana Terminal Tipe A terbangun}}$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$\frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A beroperasi}}{\text{Jumlah rencana Terminal Tipe A terbangun}}$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A beroperasi}}{\text{Jumlah rencana Terminal Tipe A terbangun}}$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Rasio

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah Terminal Tipe A beroperasi	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Jumlah rencana Terminal Tipe A terbangun	

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK1.1.5)	Meningkatnya rasio konektivitas layanan terminal Barang untuk mendukung konektivitas	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK1.1.5)	Rasio terminal barang untuk umum yang dibangun dan siap beroperasi melayani angkutan barang

DEFINISI:

IKK Rasio terminal barang untuk umum yang dibangun dan siap beroperasi melayani angkutan barang adalah perbandingan jumlah Terminal Barang beroperasi terhadap rencana jumlah Terminal Barang terbangun.

Jumlah Terminal Barang beroperasi merupakan jumlah seluruh Terminal Barang yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal Barang yang dimaksud mencakup seluruh Terminal Barang di Indonesia baik yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat maupun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.

Jumlah rencana Terminal Barang terbangun merupakan jumlah seluruh Terminal Barang eksisting ditambah dengan jumlah Terminal Barang baru yang direncanakan untuk dibangun. Jumlah Terminal Barang yang direncanakan untuk dibangun diperoleh dari inventarisasi kebutuhan pembangunan Terminal Barang baru yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Daftar seluruh Terminal Barang eksisting dan Terminal Barang yang direncanakan untuk dibangun adalah sebagai berikut :

Terminal Barang Eksisting

1. Terminal Barang Internasional Entikong
2. Terminal Barang Internasional Aruk
3. Terminal Barang Internasional Nanga Badau
4. Terminal Barang Internasional Motaain
5. Terminal Barang Internasional Wini
6. Terminal Barang Internasional Motamasin
7. Terminal Barang Internasional Skouw

Terminal Barang Baru yang Direncanakan untuk Dibangun

8. Terminal Barang Internasional Jagoi Babang
9. Terminal Barang Internasional Sei Kelik
10. Terminal Barang Internasional Napan
11. Terminal Barang Internasional Oepoli
12. Terminal Barang Internasional Sota
13. Terminal Barang Internasional Yetetkun

Jumlah Rencana Terminal Barang Terbangun

Jumlah Terminal Barang Eksisting + Jumlah Terminal Barang Baru yang Direncanakan untuk Dibangun = 7 + 6 = 13

CARA PERHITUNGAN:**Rumus Umum:**

Untuk menghitung IKK Rasio beroperasinya layanan terminal Barang untuk mendukung konektivitas digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Barang terbangun}}{\text{Jumlah rencana kebutuhan Terminal Barang}}$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$\frac{\text{Jumlah Terminal Barang terbangun}}{\text{Jumlah rencana kebutuhan Terminal Barang}}$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah Terminal Barang terbangun}}{\text{Jumlah rencana kebutuhan Terminal Barang}}$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Rasio

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah Terminal Barang terbangun	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Jumlah rencana kebutuhan Terminal Barang	

CATATAN :

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SKK 2.5)	Meningkatnya kapasitas operasi layanan terminal Barang sesuai SPM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK 2.5)	Persentase layanan operasi terminal Barang sesuai SPM

DEFINISI:

IKK Persentase layanan operasi terminal Barang sesuai SPM adalah persentase jumlah Terminal Barang yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap jumlah Terminal Barang kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.

Jumlah Terminal Barang yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jumlah Terminal Barang yang memperoleh skor 100% dalam survei penilaian pemenuhan SPM.

Jumlah Terminal Barang kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi merupakan jumlah Terminal Barang kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Berdasarkan Permenhub Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang, Standar Pelayanan Terminal Barang meliputi:

- (1) pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal Barang untuk Umum;
- (2) kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- (4) keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
- (5) pemanfaatan teknologi informasi;
- (6) penerapan standar keselamatan kerja;
- (7) kelancaran lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal Barang untuk Umum.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, berikut bobot nilai dan tata cara penilaian pemenuhan masing-masing aspek :

NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})		
1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan	2

	kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu	2

	yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman taman di Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah	1

	antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah	1

	dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1

Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP) Terminal	100
---	-----

Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Barang dilakukan secara *online* dengan menyebar kuisisioner *google form* ke seluruh Terminal Barang yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pengisian kuisisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisisioner seluruh Terminal Barang yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun *google drive* yang digunakan untuk membuat *form* kuesioner.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Persentase layanan operasi terminal Barang sesuai SPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Barang yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)}}{\text{Jumlah Terminal Barang kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Barang yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)}}{\text{Jumlah Terminal Barang kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Barang yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)}}{\text{Jumlah Terminal Barang kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Persentase

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah Terminal Barang yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Jumlah Terminal Barang kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SKK 2.6)	Meningkatnya kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK 2.6.1)	Persentase layanan operasi terminal tipe A sesuai SPM

DEFINISI:

IKK Persentase layanan operasi terminal tipe A sesuai SPM adalah persentase jumlah Terminal Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.

Jumlah Terminal Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jumlah Terminal Tipe A yang memperoleh skor 100% dalam survei penilaian pemenuhan SPM.

Jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi merupakan jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup:

- (1) Pelayanan Keselamatan;
- (2) Pelayanan Keamanan;
- (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
- (4) Pelayanan Kenyamanan;
- (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan;
- (6) Pelayanan Kesenjajaran.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, berikut bobot nilai dan tata cara penilaian pemenuhan masing-masing aspek :

NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})		
1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan	2

	kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
5	Ketersediaan Loket tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loket tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loket tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loket tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan.	2

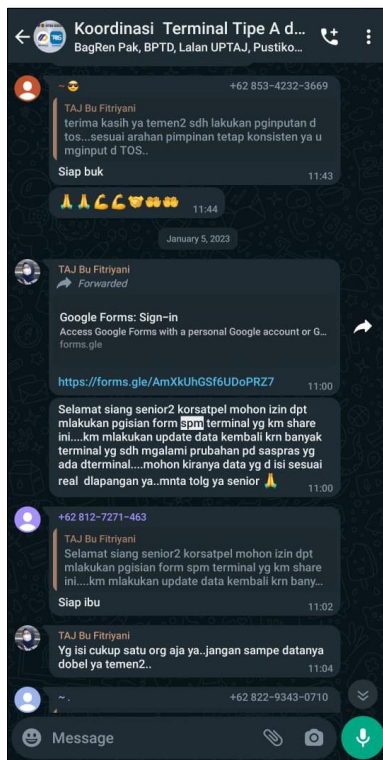
	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1

12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang	1

	Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol)	1

	apabila tidak tersedia.	
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP) Terminal		100

Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara *online* dengan menyebar kuisisioner *google form* ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



The screenshot shows a Google Form titled 'Kesesuaian Terminal Penumpang Tipe A terhadap SPM Perhubungan Tahun 2022'. The form is saved as a draft for the user 'alhafiqmuhammad@gmail.com'. It includes a sign-in prompt and a note about account information. The first question is 'Kemudahan / Keterjangkauan' with a sub-question 'Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur' worth 1 point. The response options are 'Teratur' (selected) and 'Tidak Teratur'.

Kesesuaian Terminal Penumpang Tipe A terhadap SPM Perhubungan Tahun 2022

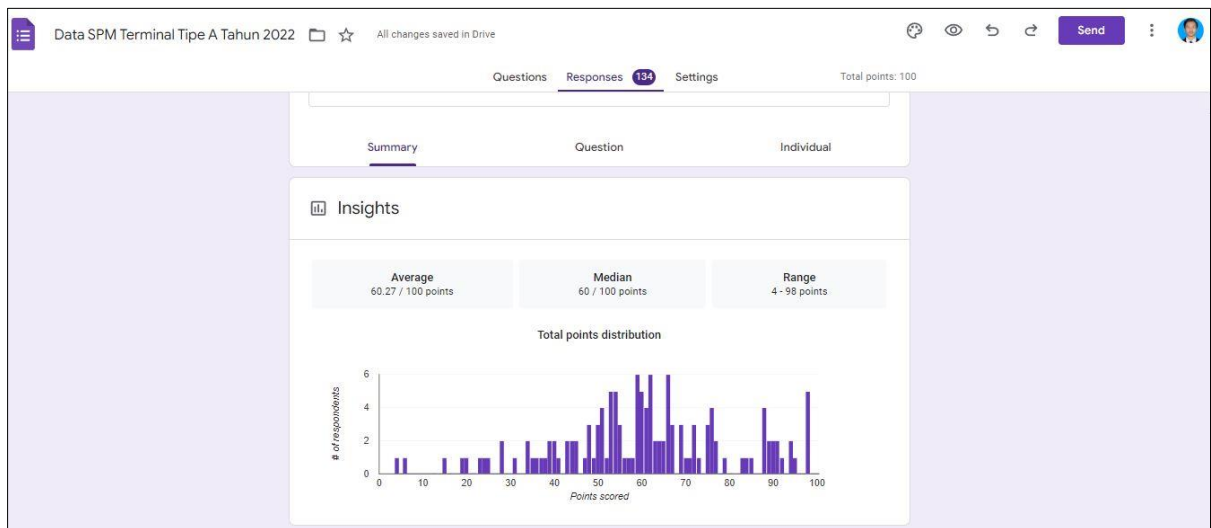
Tanggapan anda telah direkam

[View score](#)

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun *google drive* yang digunakan untuk membuat *form* kuisioner.



Data SPM Terminal Tipe A Tahun 2022 (Responses)												
File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help												
100% 123 Default 10 B I A												
C16 SUROSO, S.Sos												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Timestamp	Score	Nama	Tanggal Survei	Nama Terminal Penumpang	Lajur pejalan kaki yang n	Foto	Fasilitas keselamatan jal	Foto	Jalur Evakuasi	Foto	Alat Pemadam
2	1/5/2023 11:31:49	15 / 100	Anton Yuliansah, S.I.P	1/5/2023	Terminal Regional Lahat	Tidak Tersedia		Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia
3	1/5/2023 11:39:53	67 / 100	TIARA DIAN AKBAR, S.S	1/5/2023	Terminal Induk Lumpue	Tidak Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
4	1/5/2023 11:42:00	23 / 100	Meini Firiana, S.Pd	1/5/2023	Terminal Batu Kuning	Tidak Tersedia		Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia
5	1/5/2023 11:53:28	45 / 100	Natalia	1/5/2023	Terminal Kambang Putih	Tidak Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
6	1/5/2023 11:59:42	51 / 100	ANTON BASTIAN	1/5/2023	Terminal Bawen	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia
7	1/5/2023 12:01:10	37 / 100	Zulfiar, SH	1/5/2023	Terminal Muara Bungo	Tidak Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
8	1/5/2023 12:01:48	66 / 100	Endro Budi Cahyono	1/5/2023	Terminal Gayatri	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
9	1/5/2023 12:09:12	72 / 100	Fitriyati Fakhri, A.Md.T	1/5/2023	Terminal Cepu	Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia
10	1/5/2023 12:10:09	54 / 100	Tugiri	1/5/2023	Terminal Sumar Payung	Tidak Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
11	1/5/2023 12:12:50	34 / 100	Imam Soejat, S. Si. T	1/5/2023	Terminal Mendolo	Tidak Tersedia		Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia		Tersedia
12	1/5/2023 12:20:28	78 / 100	Parindungan saragih	1/5/2023	Terminal Ampas	Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
13	1/5/2023 12:20:36	35 / 100	Resti Salwati Nur	1/5/2023	Terminal Latenri Sessu P	Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia
14	1/5/2023 12:29:49	39 / 100	ANDRI YANI BAKTI, A.Md	1/5/2023	Terminal Sri Bulan	Tidak Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
15	1/5/2023 12:31:02	60 / 100	Huma Pijar Ihami	1/5/2023	Terminal Jati	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia
16	1/5/2023 12:32:36	28 / 100	SUROSO, S.Sos	1/5/2023	Terminal Bobot Sari	Tidak Tersedia		Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia
17	1/5/2023 12:32:39	60 / 100	Huma Pijar Ihami	1/5/2023	Terminal Jati	Tidak Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia
18	1/5/2023 12:34:19	60 / 100	SUYATNO	1/5/2023	Terminal Puntoyo	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
19	1/5/2023 12:36:59	59 / 100	Achmad Kholla	1/5/2023	Terminal Pelalangan	Tidak Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia
20	1/5/2023 12:40:36	50 / 100	HERIYANTO, BA	1/5/2023	Terminal Batoh	Tidak Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
21	1/5/2023 12:54:03	24 / 100	WASIMAN	5/1/2023	Terminal Kiliran Jao	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
22	1/5/2023 12:58:01	84 / 100	HADI SUPENO, SH	1/5/2023	Terminal Arjosari	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia		Tersedia
23	1/5/2023 13:00:51	98 / 100	Febri setiawan	1/5/2023	Terminal Punorejo	Tersedia		Tersedia				Tersedia
24	1/5/2023 13:01:05	61 / 100	Parindungan	1/5/2023	Terminal Pinang Baris	Tidak Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tidak Tersedia
25	1/5/2023 13:03:34	66 / 100	CUCU SARIPODIN	1/5/2023	Terminal Guntur Melati	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia
26	1/5/2023 13:26:19	84 / 100	YUNIKI RAHMAT YUNUS	1/5/2023	Terminal KH. Ahmad Sar	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia
27	1/5/2023 13:36:36	62 / 100	RIAN RIFKIANSYAH	1/5/2023	Terminal Kabumen	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia
28	1/5/2023 13:37:12	19 / 100	Eti Saedi	1/5/2023	Terminal Cikampek	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia
29	1/5/2023 13:45:51	90 / 100	ONI SURYANTO, SH	1/5/2023	Terminal Surodikan	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia	https://drive.google.com/	Tersedia

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Persentase layanan operasi terminal tipe A sesuai SPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)}}{\text{Jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)}}{\text{Jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)}}{\text{Jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Persentase

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah Terminal Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi.	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SKK 2.6)	Meningkatnya Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK 2.6.2)	Persentase tindak lanjut Kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman

DEFINISI:

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Perusahaan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan ukuran capaian kinerja yang menggambarkan tingkat implementasi kerja sama perusahaan prasarana LLAJ sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi dan telah menindaklanjuti kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Jumlah 113 (seratus tiga belas) Terminal Tipe A beroperasi adalah keseluruhan Terminal Tipe A yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang ditandai dengan adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, serta telah dilakukan kerja sama pemanfaatan BMN. Pemanfaatan BMN dimaksud meliputi skema sewa dan pinjam pakai atas aset BMN yang berada di lingkungan Terminal Tipe A.

Jumlah Perjanjian Pemanfaatan BMN pada Terminal Tipe A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan akumulasi perjanjian kerja sama pemanfaatan BMN yang telah ditetapkan dan masih berlaku. Nilai ini menjadi dasar penghitungan capaian kinerja IKK, yang mencerminkan tingkat efektivitas tindak lanjut kerja sama perusahaan prasarana LLAJ pada Terminal Tipe A sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Daftar seluruh Terminal Tipe A eksisting dan Terminal Tipe A yang direncanakan untuk dibangun adalah sebagai berikut :

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Persentase tindak lanjut Kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A beroperasi}}{\text{Jumlah rencana Perjanjian Pemanfaatan}}$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$\frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A beroperasi}}{\text{Jumlah rencana Perjanjian Pemanfaatan}}$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A beroperasi}}{\text{Jumlah rencana Perjanjian Pemanfaatan}}$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:	
Rasio	
SUMBER DATA:	
DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah Terminal Tipe A beroperasi	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Jumlah kerja sama pemanfaatan BMN	

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4640 – PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SKK 2.7)	Meningkatnya Keterpaduan dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Sistem Transportasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK 2.7)	Presentase Penyelesaian Dokumen RIJLLAJ yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Transportasi Jalan

DEFINISI:

Presentase Penyelesaian Dokumen RIJLLAJ yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Transportasi Jalan adalah perbandingan jumlah dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) yang dapat dimanfaatkan terhadap rencana jumlah Dokumen RIJLLAJ Provinsi di Seluruh Indonesia.

jumlah dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) yang dapat dimanfaatkan merupakan jumlah dokumen Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen RIJLLAJ, Jumlah dokumen RIJLLAJ Nasional, serta dokumen RIJLLAJ Nasional yang sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi hingga tersusunnya Dokumen RIJLLAJ Provinsi sampai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur mengenai RIJLLAJ atau semisalnya.

Jumlah rencana Dokumen RIJLLAJ Provinsi di Seluruh Indonesia merupakan jumlah provinsi di Seluruh Indonesia yang menyusun dokumen RIJLLAJ Provinsi hingga menerbitkan Peraturan Gubernur. Jumlah rencana dokumen RIJLLAJ Provinsi sesuai dengan Jumlah Provinsi di Seluruh Indonesia.

Daftar rencana jumlah dokumen RIJLLAJ Provinsi di Seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

14. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Provinsi Sumatera Utara;
16. Provinsi Sumatera Selatan;
17. Provinsi Sumatera Barat;
18. Provinsi Bengkulu;
19. Provinsi Riau;
20. Provinsi Kepulauan Riau;
21. Provinsi Jambi;
22. Provinsi Lampung;
23. Provinsi Bangka Belitung;
24. Provinsi Kalimantan Barat;
25. Provinsi Kalimantan Timur;
26. Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Provinsi Kalimantan Utara;
29. Provinsi Banten;
30. Provinsi DKI Jakarta;
31. Provinsi Jawa Barat;
32. Provinsi Jawa Tengah;

33. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
34. Provinsi Jawa Timur;
35. Provinsi Bali;
36. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
37. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
38. Provinsi Gorontalo;
39. Provinsi Sulawesi Barat;
40. Provinsi Sulawesi Tengah;
41. Provinsi Sulawesi Utara;
42. Provinsi Sulawesi Tenggara;
43. Provinsi Sulawesi Selatan;
44. Provinsi Maluku Utara;
45. Provinsi Maluku;
46. Provinsi Papua Barat;
47. Provinsi Papua;
48. Provinsi Papua Tengah;
49. Provinsi Papua Pegunungan;
50. Provinsi Papua Selatan;
51. Provinsi Papua Barat Daya.

Jumlah Rencana Dokumen RIJLLAJ Provinsi di Seluruh Indonesia

Jumlah Rencana Dokumen RIJLLAJ Provinsi di Seluruh Indonesia merupakan Jumlah Provinsi di Seluruh Indonesia = 38 (tiga puluh delapan) Provinsi

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Presentase Penyelesaian Dokumen RIJLLAJ yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pedoman Tata Cara Penyusunan RIJLLAJ} + \text{Jumlah dokumen RIJLLAJ Nasional} + \text{Dokumen RIJLLAJ yang dapat dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Rencana Dokumen RIJLLAJ Provinsi Seluruh Indonesia}}$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$= \frac{\text{Jumlah Pedoman Tata Cara Penyusunan RIJLLAJ} + \text{Jumlah dokumen RIJLLAJ Nasional} + \text{Dokumen RIJLLAJ yang dapat dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Rencana Dokumen RIJLLAJ Provinsi Seluruh Indonesia}}$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$= \frac{\text{Jumlah Pedoman Tata Cara Penyusunan RIJLLAJ} + \text{Jumlah dokumen RIJLLAJ Nasional} + \text{Dokumen RIJLLAJ yang dapat dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Rencana Dokumen RIJLLAJ Provinsi Seluruh Indonesia}}$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Presentase

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah dokumen Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen RIJLLAJ;	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Jumlah dokumen RIJLLAJ Nasional;	
- Jumlah dokumen Rencana Induk Lalu Lintas	

dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) yang dapat dimanfaatkan.	
---	--



PROGRAM KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK 3.1)	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK 3.1.4)	IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM untuk mendukung keselamatan

DEFINISI:

IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM untuk mendukung keselamatan merupakan perbandingan antara pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM dibagi dengan seluruh pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan dalam satuan persen (%).

Jumlah Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM adalah jumlah kendaraan angkutan barang yang dilakukan pengawasan melalui kegiatan penimbangan di fasilitas penimbangan yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dibuktikan dengan sertifikat pemenuhan SPM sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 4044 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor. Penghitungan indikator ini hanya mencakup kendaraan yang diawasi pada fasilitas penimbangan bersertifikat SPM dan dilaksanakan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku.

Jumlah Seluruh Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan adalah jumlah kendaraan angkutan barang yang dilakukan pengawasan melalui kegiatan penimbangan di seluruh fasilitas penimbangan kendaraan bermotor yang beroperasi, baik yang telah maupun belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengoperasian Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia. Penghitungan indikator ini mencakup seluruh kendaraan yang diperiksa pada fasilitas penimbangan yang secara resmi ditetapkan beroperasi dan melaksanakan fungsi pengawasan angkutan barang.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Penimbangan meliputi aspek:

- Kepastian hukum terhadap penindakan pelanggaran;
- Alat penimbangan kendaraan bermotor bertanda tera sah yang berlaku;
- Standar dan spesifikasi Alat Penimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketersediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi;
- Ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja;
- Ketepatan waktu pelayanan;
- Kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan;
- Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana; dan

i. Sarana pengaduan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspek tersebut, rincian tolak ukur indikator, pembobotan, serta tata cara penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dan tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 4044 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor. Penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fasilitas Penimbangan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada skema, tahapan, dan alur penilaian sebagaimana peraturan dimaksud.

Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui pengumpulan data dan verifikasi pemenuhan setiap aspek dan indikator SPM pada masing-masing fasilitas penimbangan sesuai kondisi aktual operasional. Hasil penilaian pemenuhan SPM pada seluruh fasilitas penimbangan yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat direkapitulasi dalam berita acara, serta digunakan sebagai dasar penetapan status pemenuhan SPM Fasilitas Penimbangan dan bahan monitoring serta evaluasi kinerja penyelenggaraan fasilitas penimbangan.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM untuk mendukung keselamatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pengawasan KAB pada Fasilitas Penimbangan yang telah memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pengawasan KAB pada seluruh Fasilitas Penimbangan yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$= \frac{\text{Jumlah Pengawasan KAB pada Fasilitas Penimbangan yang telah memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pengawasan KAB pada seluruh Fasilitas Penimbangan yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$= \frac{\text{Jumlah Pengawasan KAB pada Fasilitas Penimbangan yang telah memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pengawasan KAB pada seluruh Fasilitas Penimbangan yang beroperasi.}} \times 100\%$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Persentase

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah Fasilitas Penimbangan yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Jumlah Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di setiap Fasilitas Penimbangan - Jumlah Fasilitas Penimbangan kewenangan Ditjen Perhubungan Darat yang beroperasi	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	82.2	82.3	82.76	82.78	82.8	82.82	Bagian Perencanaan / Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (Nilai Evaluasi Mandiri SAKIP Eselon II)
		Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	3.38	3.38	3.38	3.39	3.4	3.4	Biro Perencanaan dan Bagian Perencanaan, Kementerian Perhubungan
		Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	94.10	94.10	96.12	96.17	96.22	96.27	Bagian Keuangan/ Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (Emonsa Omspan)
		Tingkat Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor)		100	100	100	100	100	Bagian Keuangan/ Direktorat

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB
		Kementerian Perhubungan							Prasarana Transportasi Jalan
		Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	3.20	3.20	3.54	3.55	3.56	3.57	Bagian Keuangan
		Tingkat Digitalisasi Arsip (Skor)	79	79.11	79.21	79.31	79.41	79.51	Bagian Hukum Humas dan Umum
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	80	80	80.1	80.2	80.3	80.4	Bagian Organisasi dan Tata Laksana/